

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari internal instansi, wawancara pegawai dan sumber literatur lainnya, atas pembahasan yang terdapat pada BAB III dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak badan KPP Pratama Kuningan lebih tinggi ketika pandemi berlangsung. Dari data yang diperoleh terdapat kenaikan wajib pajak badan yang melaporkan kewajibannya dalam bentuk angsuran PPh pasal 25 setiap bulan. Tahun 2019 terdapat 260 wajib pajak badan yang melaporkan angsuran PPh pasal 25. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak badan yang melaporkan PPh pasal 25 meningkat 8,85% atau sejumlah 283 wajib pajak dan di tahun 2022 sejumlah 281 wajib pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak badan pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%. Aturan ini tertuang dalam PP No. 30 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, tarif PPh badan. Adanya penurunan tarif PPh badan dikala pandemi membuat wajib pajak badan merasa beban perpajakan mereka menjadi lebih ringan.

2. Realisasi penerimaan PPh pasal 25 badan untuk kuartal satu sampai kuartal tiga nilainya lebih besar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp13,7 miliar. Jumlah tersebut didapat karena tarif yang dikenakan di tahun tersebut sebesar 25%. Berbeda dengan tahun 2020 dan 2021, nilai penerimaan PPh badan masing-masing tahun dari kuartal satu sampai kuartal tiga adalah Rp12,2 miliar dan Rp7,4. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut tarif PPh yang dikenakan lebih kecil yaitu 22%. Terlebih di tahun 2021 sekitar 80 wajib pajak badan strategis KPP Pratama Kuningan berpindah administrasi perpajaknya ke KPP Madya Karawang sehingga membuat penerimaan pajaknya lebih rendah.
3. Kendala yang dialami KPP Pratama Kuningan dalam memaksimalkan penerimaan PPh badan sebelum pandemi terjadi adalah kurangnya jumlah pegawai (AR) yang bertugas, pengawasan wilayah kurang akibat jarak yang cukup jauh dan data internal DJP yang digunakan untuk penggalan potensi belum banyak. Pandemi yang muncul di awal Maret 2020 membuat perekonomian menurun. Hal ini memberikan masalah baru karena penerimaan pajak menjadi berkurang sehingga KPP Pratama Kuningan harus melakukan langkah-langkah intensif agar penerimaan PPh badan dapat direalisasikan secara maksimal walaupun ketika terjadi pandemi.
4. Upaya untuk menanggulangi kendala dalam memaksimalkan potensi penerimaan PPh badan di KPP Pratama Kuningan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu upaya yang berasal dari pemerintah dan upaya dari KPP Pratama Kuningan. Upaya yang berasal dari pemerintah tertuang dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Melalui PMK tersebut telah terjadi perubahan struktur organisasi di KPP Pratama sehingga cakupan pengawasan wajib pajak menjadi lebih banyak. Sejalan dengan perubahan tersebut pegawai (AR) juga ikut bertambah menjadi 45 orang sehingga beban kinerja pegawai menjadi lebih sempit. Hal itu sangat menguntungkan KPP Pratama Kuningan karena pegawai dapat menjadi lebih fokus dalam memberikan pengawasan di wilayah kerjanya. Selain itu, data internal yang dibutuhkan menjadi lebih banyak dan mudah diakses oleh pegawai sehingga penggalian potensi dapat dilakukan secara maksimal. Upaya yang berasal dari KPP Pratama Kuningan adalah dengan melakukan *mapping* terhadap wajib pajak badan. *Mapping* digunakan untuk mengetahui sektor mana saja yang terdampak pandemi *Covid-19* dan sektor yang tidak terdampak atau bahkan mengalami kenaikan. Fokus KPP Pratama Kuningan dalam memaksimalkan penerimaan PPh badan berasal dari sektor yang tidak terdampak pandemi dan yang mengalami kenaikan, yaitu sektor retail; rumah sakit, apotek dan bidang kesehatan lainnya; budidaya ayam; bendahara pemerintah; toko emas; dan jasa konstruksi/properti.